

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ashshofa, B. (2004). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Auliansah, I. (2016). Tata Cara Penagihan Pajak Penghasilan Kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. *Laporan Tugas Akhir. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Ayza, B. (2017). *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*. Depok: Kencana.
- Barata, A. A. (2011). *Panduan Lengkap Pajak Penghasilan*. Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka.
- Devano, S., & Rahayu, S. K. (2006). *Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Gusfahmi. (2011). *Pajak Menurut Syariah-Edisi Revisi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2014). *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Kasimon, F. N. (2006). Beberapa Kendala dan Upaya dalam Proses Penagihan Tunggakan Pajak. *Perspektif Volume XI Edisi April*, 95-96.
- Komara, A. (2012). *Cara Mudah Memahami Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Mardiasmo. (2002). *Perpajakan (Edisi Revisi Tahun 2002)*. Yogyakarta: Andi.
- Moenaf. (1995). *Pajak Penghasilan 1994 (Suatu Interpretasi dan Catatan)*. Jakarta: Erlangga.

- Rahatiani, P. S. (2015). Manajemen Pajak atas PPh Badan Koperasi Karyawan Ruwa Jurai. *Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Resmi, S. (2013). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rosdiana, H., & Irianto, E. S. (2012). *Pengantar Ilmu Pajak (Kebijakan dan Implementasi di Indonesia)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soemarso. (2007). *Perpajakan: Pendekatan Komprehensif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Susilo, H., Sidiq, R. B., & Prasetya, A. (2016). Implementasi Penagihan Pajak Sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 J.o Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. *Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 8 No. 1, 5*.
- Sutarno, N. (2006). Pelaksanaan Sita Eksekutorial sebagai Alat Penagihan Paksa Pembayaran Hutang Pajak (Sudi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Tegal). *Skripsi. Fakultas Hukum*. Tegal: Universitas Pancasakti.
- Zuraida, I., & Advianto, H. S. (2011). *Penagihan Pajak (Pajak Pusat dan Pajak Daerah)*. Bogor: Ghalia Indonesia.

**Undang-Undang:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, dan selanjutnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 yang telah diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 yang selanjutnya diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

**Internet:**

Dipetik Oktober 2, 2018, dari Wikipedia Bahasa Indonesia:

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kantor\\_Pelayanan\\_Pajak](https://id.wikipedia.org/wiki/Kantor_Pelayanan_Pajak)

Dipetik Oktober 2, 2018, dari Wikipedia Bahasa Indonesia:

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Pekalongan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekalongan)

Ganang, S. Dipetik Oktober 11, 2018, dari Analisis Deskriptif Faktor-faktor yang Memengaruhi Kenyamanan Membaca Pemustaka (Studi Kasus Pemustaka di UPT Perpustakaan Politeknik Negeri Semarang):

[http://eprints.undip.ac.id/40985/3/BAB\\_III.pdf](http://eprints.undip.ac.id/40985/3/BAB_III.pdf)